

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Sujarweni (2019: 7) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak yang tercipta unit kerja baru yang menggunakan tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. UMKM diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UMKM mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, baik di negara-negara berkembang, maupun di negara-negara maju. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia sudah diakui bahwa UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan. Perannya dalam pertumbuhan kesempatan kerja, sangat strategis, sejalan dengan upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran.

Peran strategis yang lain dari UMKM adalah meningkatkan penghasilan, dimana UMKM ikut berperan dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan ditengah persaingan yang sangat ketat dari usaha tradisional ke era digitalisasi untuk mendukung operasional usaha mereka.

Berdasarkan jumlah banyaknya usaha menurut skala usaha provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Kota Bekasi. Perkembangan UMKM yang terjadi di Kota Bekasi menunjukkan perkembangan yang sangat bagus, dan dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang terdata setiap tahunnya baik usaha kecil yang sudah terdaftar maupun usaha kecil yang masih merintis.

Pelaku UMKM tersebut menghadapi berbagai macam kendala. Kendala-kendala yang ada diantaranya yaitu rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman mengenai teknologi informasi dan kurangnya memahami di dalam menyusun laporan keuangan, padahal salah satu pendukung UMKM dengan kualitas baik yaitu bagaimana cara UMKM

menerapkan laporan keuangan karena laporan keuangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Berikut disajikan data jumlah banyaknya usaha menurut wilayah Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut:

Table 1.1 Data Perkembangan UMKM Kota Bekasi

Tahun	Proyeksi Jumlah UMKM
2016	203056
2017	215620
2018	228960
2019	243127
2020	258170
2021	274143
2022	291105
2023	309116

Sumber : <https://opendata.jabarprov.go.id/2023>

Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat perkembangan UMKM kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2023, di dalam mempertahankan usahanya agar tetap berjalan dan berkembang. Salah satu usaha berskala kecil, dan menengah yang ada di Kota Bekasi yaitu Kedai Essemu menjual paket makanan hemat seperti nasi ayam penyet goreng, nasi cumi balado, nasi paru penyet goreng, yang bertempat di Jl. Bambu Kuning, Rt 003/Rw 003, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17114 merupakan UMKM bidang kuliner, peluang usaha kuliner di Indonesia memang cukup menjanjikan. Inilah mengapa memiliki usaha makanan dengan modal yang relatif kecil namun memberikan potensi keuntungan yang besar dan dapat menjadi pilihan yang cerdas.

Laporan keuangan tersedia informasi yang menunjukkan posisi keuangan usaha dari pelaku UMKM yang sangat bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk memaksimalkan laba usaha serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan.

Menyusun laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum. Tetapi pada kenyataannya penerapan akuntansi pada UMKM saat ini masih sangat terbatas. Ada banyak alasan UMKM tidak menerapkan akuntansi dalam laporannya, salah satunya dikarenakan UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan

penyusunan laporan keuangan. Kebanyakan pelaku UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dijual dan dibeli, jumlah piutang dan utang yang pencatatannya hanya sebagai pengingat saja tanpa ada format bakunya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku UMKM dapat mengetahui jumlah laba bersih yang diterima dan jumlah modal akhir setiap tahunnya yang hampir sama jumlahnya, jika dicatat sesuai dengan sistem akuntansi.

Pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan adalah kurangnya pengetahuan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali. Kalaupun ada pelaku UMKM yang mengetahui adanya SAK, kurangnya minat pelaku UMKM menjadi alasan tidak disusunnya laporan keuangan karena dirasa memberatkan dan menyusahkan. Kebanyakan pelaku UMKM berfikir lebih baik membuat catatan sederhana dan mudah untuk diterapkan. Apalagi jika usaha yang dijalankan terutama bagian keuangan usahanya ditangani sendiri oleh pemilik usaha.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM biasanya tidak tercatat secara sistematis atau dituangkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), hal yang demikian terjadi karena kebanyakan UMKM membiayai sendiri kegiatan usahanya, atau meminjam pada keluarga atau sanak saudara. UMKM tersebut memiliki anggapan bahwasannya pencatatan dengan menggunakan sistem akuntansi akan menghabiskan banyak biaya serta sumber daya manusia yang kurang memadai.

Hal demikian tidak akan dapat dilakukan jika pemilik UMKM membutuhkan modal dari bank, atau investor yang ingin menanamkan modalnya, serta auditor jika UMKM tersebut memerlukan audit. Maka pencatatan laporan keuangan yang sesuai standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) layak diterapkan untuk UMKM, sehingga tersaji laporan yang mudah dipahami dan akurat.

Prakteknya terdapat beberapa yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Padahal laporan keuangan adalah yang paling essensial bagi pemilik perusahaan sebagai untuk mengembangkan usaha mereka dalam hal pengambilan keputusan.

. Diterbitkan SAK ETAP bagi UMKM dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas UMKM melalui informasi keuangan yang disajikan, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit dari perbankan dan para calon investor potensial.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perkembangannya SAK ETAP kurang sederhana dalam menyusun laporan keuangan UMKM, sehingga pada akhir tahun 2016 IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP, karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan. Adanya SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan.

SAK EMKM berlaku efektif per 1 Januari 2018 dan penerapan ini diperkenankan, dengan prinsip kesederhanaan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyajikan laporan keuangan untuk membantu kualitas UMKM dalam kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan penerapan SAK EMKM terhadap UMKM juga diharapkan membuat perkembangan UMKM semakin maju didalam perekonomian Indonesia.

Pelaporan keuangan yang andal, dapat dipercaya, dan dapat lebih memudahkan, UMKM dapat menggunakan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya. Penerapan SAK EMKM ini belum maksimal diberbagai daerah di Indonesia. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM (Studi Kasus Kedai Essemu)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut :

1. Pengetahuan teknologi masih rendah, karena kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital.
2. Pembukuan yang masih manual, dikarenakan dirasa memberatkan dan menyusahkan.
3. Pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat batasan yaitu :

1. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan KEDAI ESSEMU pada bulan September 2023.
2. Data yang didapatkan berupa dokumen pencatatan transaksi penjualan dari pemilik Usaha Kedai Essemu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh KEDAI ESSEMU tersebut?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan KEDAI ESSEMU sudah sesuai dengan SAK EMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan yang dilakukan KEDAI ESSEMU tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan KEDAI ESSEMU sudah sesuai dengan SAK EMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang mekanisme SAK EMKM serta penerapannya dan kondisi lapangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi suatu acuan atau rujukan bagi mahasiswa-mahasiswi dari universitas lain yang ingin meneliti tentang SAK EMKM maupun tentang UMKM.
3. Bagi Pelaku UMKM
Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan sekaligus sosialisasi bagi para pelaku UMKM tentang adanya pencatatan akuntansi yang mudah diaplikasikan yakni SAK EMKM. Sehingga diharapkan para pelaku UMKM tersebut dapat mengaplikasikan SAK EMKM dalam kegiatan usahanya.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi–materi yang tertera pada laporan proposal penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan SAK EMKM dan UMKM seperti pengertian, manfaat, dan tujuan, karakteristik, pengukuran

unsur-unsur laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, yang diambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian yang akan diteliti berikut cara pemilihan objek penelitian. Bab ini juga menguraikan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan serta langkah - langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data hingga menyimpulkan hasil.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang menguraikan hasil yang didapat dari pengumpulan data untuk dianalisis. Bab ini terdiri dari data Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhasil di dapat, profil umkm, berikut hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil atas penelitian ini, dan juga saran yang penulis sampaikan untuk pihak objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku,jurnal,rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.